

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH DASAR INPRES 3 BALUASE KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI

Husain¹, Moh Tofan Samudin², Nurmiati³.

¹²³ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email Korespondensi.husain145@gmail.com)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi Guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Penelitian dilaksanakan di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Pengambilan informan mempergunakan *Purposive* yaitu dengan menetapkan 5 orang sebagai informan. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 1. Observasi. 2. Wawancara 3. Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi maka peneliti berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa seluruh variabel yaitu komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci. Implementasi Kebijakan Publik, Sertifikasi Guru

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the teacher certification policy at SD Inpres 3 Baluase, Dolo Selatan District, Sigi Regency. The research was conducted at SD Inpres 3 Baluase, Dolo Selatan District, Sigi Regency. Taking informants using Purposive namely by setting 5 people as informants. In order to obtain the data needed in this study, the authors used data collection methods 1. Observation. 2. Interview 3. Documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis techniques.

The results of research on the implementation of the teacher certification policy at SD Inpres 3 Baluase, Dolo Selatan District, Sigi Regency, the researchers succeeded in drawing a conclusion that all variables, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, have not gone well.

Keywords. Public Policy Implementation, Teacher Certification

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan baik dan berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dengan perlahan namun pasti telah meninggalkan Indonesia dalam kualitas pendidikan sebuah bangsa. Oleh karena berbicara tentang kualitas pendidikan, kita tidak lepas dari sosok guru sebagai orang yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan.

Islam memandang profesionalitas merupakan suatu keharusan dalam setiap profesi atau pekerjaan, Rasulullah saw. dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a. mengatakan: “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat”. Dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyianiyakan amanah itu?’ Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa Islam menjunjung tinggi profesionalitas dalam setiap pekerjaan. Profesionalitas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mengemban suatu tugas. Hal ini disebabkan karena tugas yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik pada lembaga

yang memberikan amanah, kepada masyarakat, dan yang terpenting bahwa amanat itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kebijakan terhadap peningkatan kualitas guru telah ditetapkan pemerintah pusat melalui program sertifikasi guru yang merupakan upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru-guru yang berkualitas dan berkompetensi dalam kategori profesional. Guru profesional yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik sehingga hal tersebut dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan sertifikasi guru diharapkan mempengaruhi eksistensi guru sebagai sumber daya utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia jelas memegang peranan strategis untuk terbentuknya anak didik berkualitas atau tidak.

Sertifikasi jelas merupakan suatu penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan kinerja guru melalui suatu proses pendidikan yang sistematis dan procedural untuk mencapai suatu kompetensi tertentu

yang harus dikontrol melalui uji kompetensi secara berkala, yang menjadikan seseorang profesional dalam bidangnya. Begitu juga halnya seorang guru dituntut untuk mempunyai sertifikasi sebagai pengakuan atau penghargaan atas kompetensi sebagai profesional dalam bidang pengajaran tertentu yang harus dikontrol melalui uji kompetensi secara berkala.

Kenyataan yang ditemukan di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa kompetensi guru, tidak mengalami peningkatan yang berarti, jika dibandingkan dengan sebelum mereka mendapatkan sertifikat pendidik atau disertifikasi. Hasil sertifikasi (peningkatan kesejahteraan), lebih diarahkan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, seperti membeli kendaraan, tanah, perabot rumah tangga, dan sebagainya yang tidak relevan dengan peningkatan kompetensi guru.

Padahal dengan adanya sertifikasi tersebut guru diharapkan kesejahteraan guru yang perlu ditingkatkan dalam aspek pendapatannya (gaji) yang masih minim untuk memenuhi kebutuhan pokok guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dapat tercapai

sehingga kompetensi guru dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Guna mendapatkan data dari sumber yang sama, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara serempak. Agar data satu dengan lainnya saling dukung mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:

Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain itu, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut termasuk dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. belum optimalnya komunikasi sehingga berimplikasi pada pemahaman yang baik.

Pada dasarnya komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sebagai suatu proses, mempunyai persamaan dengan bagaimana mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (*kontradiktif*) dan hal-hal yang sejalan (*selaras, serasi*) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi.

Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, sebagai berikut :

Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu

implementasi kebijakan yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam konteks penelitian ini memberikan informasi kepada penerima kebijakan untuk memberikan penguatan atas berbagai kebijakan tersebut.

Informasi yang di berikan oleh pelaksana kebijakan khususnya Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi mempengaruhi pengertian dan pemahaman dari guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dengan demikian informasi yang disampaikan sebagai sumber informasi ditentukan oleh sumber informasi saja, tetapi pengertian dari pemberi informasi dan penerima informasi sangat menentukan hakikat informasi tersebut.

Kejelasan

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-

saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetaskan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Kejelasan dalam komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan tanggapan atau umpan balik (*feedback*). Dalam hal ini pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

Kejelasan informasi atas tujuannya adanya kebijakan sertifikasi guru merupakan proses landasan untuk semua hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan agar tujuan sertifikasi tercapai, kejelasan informasi pada akhirnya berdampak pada pemahaman atas kebijakan tersebut.

Melalui komunikasi maka terdapat kejelasan informasi karena hal ini dikarenakan orang bertukar dan berbagi informasi satu dengan yang lainnya

Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima kebijakan sertifikasi itu sendiri.

Konsistensi atas kebijakan menunjukkan pada kesepahaman atas informasi yang diberikan kepada penerima kebijakan, jika konsistensi dalam komunikasi tidak tercapai berdampak pada penyalahan tafsiran dari implementasi kebijakan tersebut, bagi penerima kebijakan.

Konsistensi dalam komunikasi sebagai pegangan bagi penerima kebijakan tersebut, mereka akan mendukung kebijakan sertifikasi guru di SD Inpres 3 Baluase jika konsistensi dari implelementasi kebijakan tersebut dapat terjaga.

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, dan sumber daya finansial atau anggaran. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Staf Pegawai

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya

Selain itu sumber daya yang dimiliki tidak hanya perlu dilihat dari aspek

pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki penerima kebijakan juga oleh pelaksana kebijakan tetapi juga sangat perlu diperhatikan adalah produktivitas kerja itu sendiri.

Anggaran

Selain sumber daya manusia terdapat pula sumber daya anggaran yang mana merupakan sumber daya yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kemampuan anggaran merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi dan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan, karena tanpa adanya anggaran yang cukup kebijakan tidak mungkin secara optimal mampu diimplementasikan. Kemampuan anggaran merupakan variabel penting dalam menilai sumber daya, dimana kondisi kemampuan anggaran yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan.

Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan dilaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal dan memuaskan.

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan termasuk kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan adalah komitmen atas peraturan tentang sertifikasi guru tersebut, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis.

Berdasarkan disposisi walaupun berbagai model atau cara telah dilakukan oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi dalam rangka sertifikasi tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi belum berjalan sebagai mana mestinya, karena karakter dari pelaksana kebijakan merupakan salah

satu satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosis organisasi bagi pengembangannya adalah mendiagnosis struktur birokrasi. Dengan kata lain, apakah struktur internal yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan organisasi atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuannya, ini berarti antara struktur organisasi dan tujuan tidak selaras.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Menurut Edwards III terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP).

Standard Operational Procedure (SOP)

Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan

tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Standard Operating Prosedure (SOP).

Fungsi dari Standard Operating Prosedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Selain itu SOP dapat pula menjelaskan tentang mekanisme yang sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara utuh. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat

training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan.

KESIMPULAN

Sertifikasi guru di SD Inpres 3 Baluase Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi maka peneliti berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa seluruh variabel yaitu komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam kategori belum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung
- Anggara Sahya, 2014, *Kebijakan Publik (Publik Policy)* CV Pustaka Setia, Bandung.
- Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67 Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dye, Thomas, R. 2002 *Understading Public policy*, New York : Prentice- Hallinc.
- Dunn, Willian N, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Hessel Nogi Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Jones, Charles O, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy)*, Rajawali Press Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- 2012. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Edisi keempat, Revisi 2012. Jakarta.
- Subarsono, AG, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tangkilisan. Hessel, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset. Yogyakarta
- Wahab Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan Pertama, CAPS Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Cet. Ketiga. Sinar Grafika Offset Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional